



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698  
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id  
TARAKAN (77121)

---

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 4 LANGKAH 5 TAHUN  
SUB KEGIATAN PENGGERAKAN PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS  
TINGKAT DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TA 2025**

**1. DATA GENDER**

Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosi, kekerasan seksual, kekerasan sosial (penelantaran).

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

Anak adalah seseorang dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan usia dibawah 18 tahun dan merupakan penduduk Kota Tarakan. Jumlah penduduk anak tahun 2024 di Kota

Tarakan 91.701.000 orang, terdiri atas anak laki-laki 47.367.000 orang dan perempuan 44.334.000 orang. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus.

## **2. IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB :**

### **A. PENYEBAB LANGSUNG**

1. Akses :
  - a. Semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pengaduan kasus.
2. Partisipasi
  - a. Anak perempuan lebih banyak melakukan pengaduan terkait permasalahan kekerasan yang dialami sedangkan anak laki-laki terkait permasalahan sosial.
3. Kontrol
  - a. Semua orang/anak yang melaporkan atas kehendak dan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
4. Manfaat :
  - a. Kegiatan ini memberikan dukungan psikologis terhadap anak baik Perempuan maupun laki-laki.

### **B. PENYEBAB TIDAK LANGSUNG :**

1. Sub kegiatan ini fokus dalam pemberian layanan pengaduan terhadap permasalahan pada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
2. Anak perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban kekerasan.
3. Masih adanya permasalahan anak yang belum dilaporkan
4. Anak Perempuan rentan jadi korban kekerasan

### 3. RENCANA AKSI

#### A. KERANGKA KERJA

SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAMPAK	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Kota Layak Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	

#### B. RENCANA AKSI

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi Tahun 2025-2029												
							Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)				
							Kinerja	Indikator	Satuan	2025	2006	2007	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	0	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									5.450.10	5.450.10	5.450.10	5.450.10	5.465.10
															4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatkannya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	perseentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	362.921.370,00	416.502.007,00	401.502.007,00	401.502.007,00	416.502.007,00
2	0	0	2.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus	40,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00	193.790.360,00	246.172.597,00	246.172.597,00	246.172.597,00	246.172.597,00

2	0	0	2.	00	Penyediaan Layanan	Jumlah	orang	40,00	47,	50,	51,	52,	53,	17.077.5	246.172.	246.172.	246.172.	246.172.
	8	.	0	05	Pengaduan Masyarakat	Anak			00	00	00	00	00	60,00	597,00	597,00	597,00	597,00
		7	2		bagi Anak yang	yang												
					Memerlukan Perlindungan	Memerl												
					Khusus Tingkat Daerah	ukan												
					Kabupaten/Kota	Perlindu												
						ngan												
						Khusus												
						Mendap												
						atkan												
						Layanan												
						Pengadu												
						an												
						Kewena												
						ngan												
						Kabupat												
						en/Kota												

#### Rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi pelayanan dengan UPTD PPPA Provinsi Kaltara
2. Membuka layanan pengaduan secara luas
3. Melakukan pendampingan secara psikologis baik oleh konselor ataupun psikolog
4. Melaksanakan rapat penguatan jejaring

#### **4. CROSSCUTTING OPD**

1. Disdik
2. Departeme Agama
3. RSUD Tarakan
4. POLRI
5. DinsosPM
6. Dinas Kesehatan
7. Basnas
8. BNN